

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan yang masih besar dan kian kompleks di kalangan masyarakat menjadi tantangan dalam meningkatkan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Konskuensi yang ditimbulkan dari kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat sulit memenuhi kebutuhan pangan, sadang dan papan secara terbatas. Selain itu kemiskinan juga mengakibatkan jutaan anak-anak tidak memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan rakyat untuk membiayai layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan perkerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga terutama terhadap keluarga miskin, hal ini juga di ikuti dengan menguatnya arus migrasi ke Kota.

Perkembangan histori kemiskinan di Indonesia pasca krisis dan sepuluh tahun terakhir. Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Bank Dunia (2008), tengah berada di ambang era baru dan tahap penting dalam sejarah pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 1998 Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi, yang mengakibatkan jutaan penduduk masuk ke dalam jurang kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan rendah atau dengan kata lain Indonesia dapat dikatakan salah satu negara yang berpenghasilan menengah.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fenomenal dunia yang tidak lepas dari yang namanya kesejahteraan terutama pada negara berkembang, baik dalam kehidupan pribadi maupun berkelompok. Kemiskinan bahkan menjadi permasalahan dalam bidang ekonomi seperti dalam perekonomian, kesehatan dan kebebasan.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2002-2017

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2002	18.20
2003	17.42
2004	16.66
2005	15.97
2006	17.75
2007	16.58
2008	15.42
2009	14.15
2010	13.33
2011	12.36
2012	11.66
2013	11.47
2014	10.96
2015	11.13
2016	10.70
2017	10.12
rata-rata	13.99

Sumber: BPS Indonesia 2002-2017 (data diolah)

Berdasarkan data BPS Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel 1.1 kemiskinan di Indonesia cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia 27,73 juta jiwa dengan persentase 10,96% dan kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2015

dengan jumlah penduduk miskin 28,51 juta jiwa dengan persentase sebesar 11,13%, sedangkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,43% dari 11,13% menjadi 10,70% dan penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 0,58% dari 10,70% menjadi 10,12%. Rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2002-2017 sebesar 13,99%. Permasalahan tingkat kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia tidak jauh berbeda dengan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dan cenderung menurun. Dimana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dari 6,89% mengalami peningkatan sebesar 7,31% pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,22% dari 7,31% menjadi 7,09%. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,87%. Rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun 2002-2017 sebesar 9,32%.

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat telah mencerminkan sudah baiknya perhatian pemerintah terhadap perekonomian dengan upaya penurunan angka kemiskinan, fenomena ini diduga karena adanya pengaruh dari Pertumbuhan Penduduk, seperti yang diungkap Malthus bahwa jumlah penduduk yang banyak dalam suatu wilayah akan mendatangkan malapetaka karena perkembangan jumlah manusia lebih cepat dari produk-produk hasil pertanian, sehingga hasil produksi pertanian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia, dan pada akhirnya terjadi malapetaka seperti tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kedua yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dalam suatu wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah di daerah tersebut mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu PDRB. Menurut Sadono Sukirno bahwa kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan tersebut besar atau kecil. Namun keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan PDRB, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan ke lapisan masyarakat. Dengan menurunnya angka PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga miskin dengan jalan merubah pola makanan pokoknya ke barang yang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. Ketiga yakni Tingkat Upah Minimum, upah bertujuan untuk memenuhi standar hidup minimum baik untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan, upah memiliki hubungan yang sangat erat dalam menurunkan tingkat kemiskinan, semakin tingginya upah pada suatu daerah maka dapat dikatakan membaiknya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka itu peran pemerintah dan pengusaha dibutuhkan dalam dampak dari pemberian upah dengan memperhatikan standar kebutuhan hidup masyarakat di daerah tersebut.

Dalam hal ini, pentingnya akan perhatian pemerintah terhadap masalah kemiskinan, sebab perekonomian sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang apabila kebutuhannya dapat terpenuhi. Namun, apabila tidak terpenuhinya suatu kebutuhan ekonomi maka dapat dikatakan tidak sempurna atau terpenuhi dengan baik kebutuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Faktor pertama yang diduga menyebabkan penurunan kemiskinan yakni Pertumbuhan Penduduk yang memberikan pengaruh positif terhadap tingkat

kemiskinan di Sumatera Barat periode 2002-2017. Berdasarkan Data BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk sebesar 5.066.476 jiwa dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 5.131.882 jiwa dengan pertumbuhan 1,29%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 5.196.289 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,26%. Pada tahun 2016 dan 2017 juga menunjukkan kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 5.259.528 jiwa sedangkan 2017 naik menjadi 5.321.489 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir 2013 hingga 2017 sebesar 1,26%.

Selanjutnya, faktor kedua yang diduga mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, dimana diperoleh dari Produk Domestik Bruto (PDRB) tahun dasar 2010 atas dasar harga konstan. Dalam proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dibanyak negara terutama negara berkembang. Syarat utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang tepat adalah kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang memang tidak cukup untuk mengatasi tingkat kemiskinan, hal ini di karena kan pertumbuhan ekonomi yang bagus tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak di iringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati,2009).

Berdasarkan data BPS Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2002-2017 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada tahun

2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,55% turun menjadi 5,26% tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,30% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat periode 2015 sampai 2017 yaitu sebesar 5,37%. Selain pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan, upah minimum juga berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, tingkat upah dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Sumatera Barat, jika tingkat upah semakin meningkat maka masyarakat akan semakin sejahtera karena terpenuhinya akan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2015 tingkat upah sebesar Rp 1.615.000 naik menjadi Rp 1.800.725 di tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 11,4%. Pada tahun 2017 tingkat upah naik menjadi Rp 1.949.284 dengan tingkat pertumbuhan upah sebesar 8,25%. Rata-rata pertumbuhan tingkat upah minimum di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 9,31%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah setiap tahunnya meningkat dengan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif serta di ikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif dan memuaskan, yaitu memberikan dampak secara tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Atas dasar uraian diatas, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode 2002-2017.**

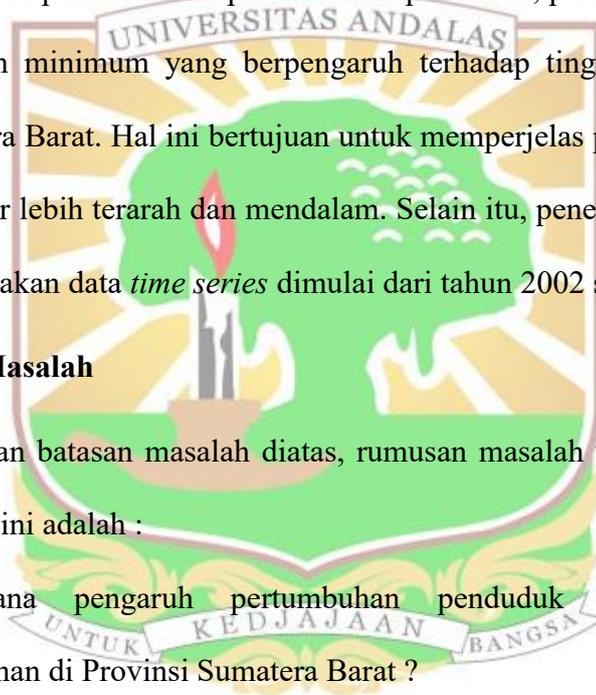
1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian terkait kemiskinan ini dibatasi pada faktor permasalahan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah minimum yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin di teliti agar lebih terarah dan mendalam. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data *time series* dimulai dari tahun 2002 sampai 2017 .

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ?



1.4. Tujuan Penelitian

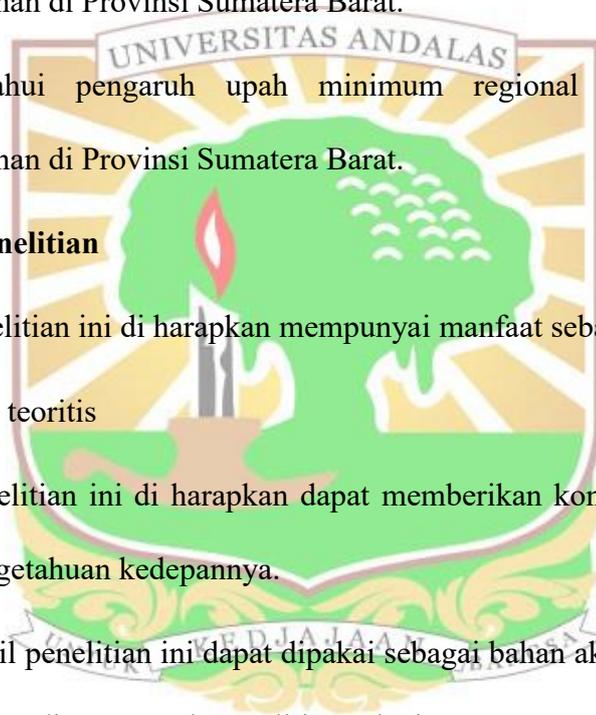
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan kedepannya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi,



tingkat upah minimum regional dan kemiskinan. Serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

- b. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan.

1.6. Sistematik Penulisan

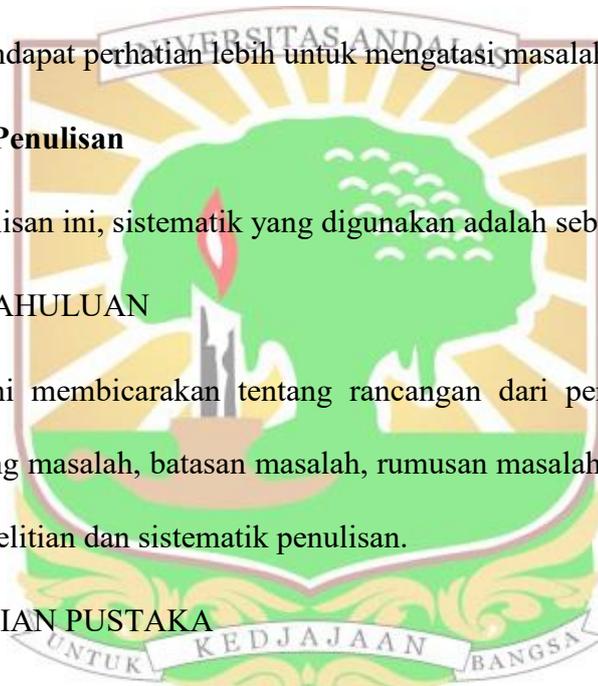
Dalam penulisan ini, sistematik yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membicarakan tentang rancangan dari penelitian mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang diambil dari data penelitian yang akan dikemukakan mengenai landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode analisis dan pengujian penyimpangan asumsi klasik.

BAB IV GAMBARAN UMUM DARAH PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini akan diuraikan deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini membuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan beberapa saran yang membagun pihak-pihak terkait dalam masalah kemiskinan pada provinsi Sumatera Barat.

